KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA PISANG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
MARIUS SOPARI
NIM. E43012002

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
E-mail : mariussoprari93@yahoocom

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupataen Sanggau yang belum optimal. Fenomena permasalahan yang diangkarat dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan belum mampu memfungsikan diri sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat menjadi sebuah peraturan desa. penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pisang, Kepala Desa Pisang, Anggota BPD Desa Pisang, Sekretaris Desa Pisang, dan masyarakat Desa Pisang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor tang menyebabkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyusun Peraturan Desa belum optimal adalah terdiri dari faktor individu, berkeneaan dengan kemampuan,keahlian dan Demografi, faktor psikologis, berkaitan dengan persepsi, sikap, motivasi, faktor Organisasi, berkaitan dengan sumber daya dan *job design*.

Kata-kata Kunci: Kinerja Organisasi, Peraturan Desa, Individu, Psikologis, Organisasi.

PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTATION COUNCIL OF DRAWING UP IN THE VILLAGE OF PISANG, DISTRIK JANGKANG, SANGGAU REGENCY

Abstrak

Research andyzed the performance of village consultation council for drawing up in the village of Pisang, Distric Jangkang, Sanggau regency has notoptimal. The phenome of this research in study was BPD as the representative councle had nod been able to function at a reservoir and channeling the aspiration of the people into a village regulation. This research was a descriptive study using a qualitative approach. Subjects in this study has the head of Pisang, BPD member, Pisang village headf, Village Secretary Pisang and pisang village community.
The result showed the three factor was making the performance of BPD not optimal the factor were Individu, capacity, and expertice of BPD Psychological factor, with regard to precision, attitude, and motivation, factor Organizacion with regard toresources, leadership.

Keywords: performance, BPD, Organization, Individu, Psychological.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kualitas kinerja adalah suatu hasil yang bisa diukur dari tingkat efisiensi dan efektivitas seseorang atau organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan yang didukung oleh sumber daya dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kuantitas kerja merupakan jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu.Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa dapat mewujudkan suatu proses demokrasi yang baik sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Desa. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, untuk menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan baik maka pada tanggal 12 September 2013 dilantik anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh Bupati Sanggau. Berdasarkan surat keputusan Bupati Sanggau nomor 119 tahun 2013 tentang pelantikan anggota BPD se-kecamatan Jangkang, sebagaimana yang telah terlampir dalam Surat Keputusan Bupati Sanggau tersebut bahwa anggota BPD di Desa Pisang yang dilantik berjumlah 7 orang.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

d. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa masa jabatan anggota BPD yang dilantik selama 5 tahun. Selama menjabat anggota BPD mempunyai fungsi yang harus dijalankan sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 55 undang-undang No 6 tahun 2014 salah satunya menyusun peraturan

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

Desa.Anggota BPD yang telah dilantik harus dapat menjalankan fungsi BPD dengan baik salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh anggota BPD adalah menyusun peraturan Desa. Pada masa jabatan BPD periode tahun 2013- 2018 atau yang sekarang hanya menghasilkan 1 peraturan yaitu peraturan tentang anggaran belanja dan pendapatan Desa (ABPDes). Sementara itu masih banyak permasalahan di Desa Pisang yang perlu dibuat peraturannya seperti penangkapan ikan yang menggunakan racun, pemeliharaan hewan ternak dan peraturan mengenai tanah umum.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa indikasi masalah dilapangan yang berhubungan dengan kinerja BPD, dimana adanya aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan seperti, Masyarakat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan hewan ternak, sehingga tidak adanya hewan ternak yang berkeliaran dijalan dan sekitar rumah warga, dan hewan ternak yang dipelihara dapat diawasi dan dijaga agar tidak merusak tanaman..

Masyarakat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan disungai. Terutama penangkapan ikan yang menggunakan racun dan bahan kimia lainnya, karena dapat merusak lingkungan seperti pencemaran sungai, penangkapan ikan yang berlebihan dan habitat ikan hewan yang ada disungai akan rusak karena bahan kimia.

Masyarat menggginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang tanah umum karena selama ini peraturan yang mengatur masalah tersebut belum ada sehingga tanah umum yang ada dikelola oleh sebagian masyarakat, hingga tanah tersebut bukan milik umum lagi namun sudah menjadi milik masyarakat yang mengelolanya.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis megidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. BPD belum mampu menyusun peraturan Desa tentang penangkapan ikan yang menggunakan racun.
2. BPD belum mampu merancang peraturan Desa tentang pemeliharaan hewan ternak
3. BPD belum mampu merancang peraturan Desa tentang pengelolaan tanah umum

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kinerja organisasi Badan

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa, di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu "mengapa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau kurang optimal?''

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Melelui penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada bidang studi Ilmu Pemerintahan, berkenaan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan suatu produk hukum dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan. Sehingga dapat memberikan sedikit informasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Secara praktis

a. Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pisang, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran sebagai bahan kajian bagi anggota BPD khususnya di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan suatu produk hukum berupa Praturan Desa. Dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

b. Bagi penulis, denganadanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengembangan wawasan dan pengetahuan, serta kemampuan berfikir khususnya dibidang ilmu pemerintahan guna menerapkan teori-teori yang telah didapat selama dibangku kuliah.

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

B. KERANGKA TEORI PENELITIAN

Kinerja Organisai

Menurut Mashun kinerja adalah gambaran tigkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic plaining* organisai (Mashun, 2006:25) dari definisi di atas dapat di pahami bahwa kinerja organisai adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/visi dan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisai dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu diketahui berapafaktor yang mempengaruhi kineja organisai. Faktor tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap proses kerja yang telah dilakukan organisasi, sudah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan atau belum.

Menurut Hennry (dalam Mangkunegara,2005:14) kinerja di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Faktor individual yang terdiri dari:
   a. Kemampuan dan keahlian
   b. Latar belakang
   c. Demografi.
2. Faktor psikologis yang terdiri dari:
   a. Persepsi
   b. Attitude
   c. Personality
   d. Pembelajaran
   e. Motivasi.
3. Faktor organisasi yang terdiri dari:
   a. Sumber daya
   b. Kepemimpinan
   c. Penghargaan
   d. Struktur
   e. Job design.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan hasil penelitian berupa gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan antara fakta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti mengharapkan dapat mengembangkan serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan sehingga peneliti dapat menemukan fakta-fakta baru dilapangan.

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang benar-benar menguasai permasalahan yang ada dilapangan, sehingga peneliti dapat mengungkapkan dan mendeskripsikan permasalahan yang ada dilapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian perlu diperoleh data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2011:226). Dengan demikian obsevasi merupakan cara memperoleh data melalui pengamatan secara lansung ke lapangan. Pengamatan dilakukan berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

2. Teknik Wawancara

Menurut Estebreng dalam sugiyono (2011:231). Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Jadi wawancara adalah proses pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara lansung dengan informan baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak. Mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sabnggau.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2011:240). Dokumen mencakup data atau imformasi yang diperoleh dari tulisan video dan lain sebagainya. Jadi dokumentasi merupakan proses rekam atau mencatat semua peeristiwa yang sudah bewrlalu. Data yang dikumpulkan cendrung data primer dimana peneliti sendiri yang melakukan dokumentasi langsung ke Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

D. HASIL PENELITIAN

Faktor Individu

Hasil analisis informasi yang disampaikan oleh informan dapat diketahui bahwa faktor individu terutama yang berkaitan dengan kemampuan, keahlian dan demografi dianggap masih

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

kurang dalam membuat peraturan desa inilah yang diduga menyebabkan kurang maksimalnya anggota BPD dalam hal membuat peraturan desa. Walapun pada tingkat Desa kemampuan anggota BPD yang dilihat dari tingkat pendidikan sudah bagus yaitu rata-rata angota BPD tamatan SMA dan ketua BPD tamatan sarjana, akan tetapi belum optimal. Namun dari latar belakang yang dimiliki oleh anggota BPD sudah baik hal ini dilihat dari tidak adanya penuturan informan yang mengatakan bahwa sebelum diterima sebagai calon anggota BPD sudah dilihat latar belakang yang dimiliki, apakah pantas jadi anggota BPD atau belum.

Faktor Psikologis

Berdasarkan keterangan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum faktor fsikologis tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam menjalakan fungsinya membuat peraturan desa namun ada hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang persepsi anggota BPD terhada BPD dalam membuat peraturan desa kurang mandirikarena untuk melakukan kegiatan yang berasal dari BPD, masih bergantung kepada Pemerintah Desa. Sikap BPD dimana sikap yang diambil dalam hal pembuatan peraturan desa yang belum tegas karena BPD hanya mengikuti apa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa, dan motivasi BPD dalam membuat peraturan desa masih kurang karena dari dalam diri anggota BPD tidak ditamanan dari lingkungan yang kurang mendukung.

Faktor Organisasi

Menurut Hennry Simamora ada tiga faktor yang dpat mempengaruhi kinerja salah satunya adalah Faktor Organisasi. Secara etimologis oerganisasi berasal dari bahasa latin yaitu organon yang berarti wadah, tempat badan atau alat. Sementara menurut istilah organisasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencpai tujuan bersama. Maka dari itu organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi antar anggota dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam faktor organisasi yang dikemukakan oleh Hennry Simamora, ada lima aspek yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan *job design.*

Sumber Daya

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan tersebut, secara umum dapat di simpulkan bahwa sumber daya yang dimilki oleh BPD seperti sumber daya material kurang memadai untuk mendukung BPD dalam

menjalakan kinerja yang optimal. sumber daya keuangan yang dimiliki oleh BPD dapat dikatan tidak mencukupi kebutuhan BPD, karena keterbatasan anggaran inilah yang diduga salah satu faktor salah satu yang menyebabkan anggota BPD tidak begitu aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga perlunya pengelolaan keuangan BPD. Pengelolaan keuangan yang baik dalam organisasi sangatlah penting, dimana keuangan ini sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk membantu BPD dalam mencapai kinerja yang maksimal terutama dalam menyususn dan menetapkan peraturan desa.

Berdasarka wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua BPD maupun Kepala Desa menyangkut sumber daya yang ada pada BPD di Desa Pisang, Kecamatan Jangkang, secara umum sumber daya yang dimiliki oleh BPD dapat dikatakan masih rencah. Hal ini dilihat dari sumber daya material yang belum memadai, dan keuangan yang dimiliki oleh BPD belum mencukupi kebutuhan.

Kepemimpinan.

Berdasarkan pernyataan dari anggota BPD tersebut diketahui bahwa memang kepemimpinan dari ketua BPD dirasakan kurang bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari penuturan anggota BPD yang mengatakan bahwa kepemimpinan ketua BPD dalam pengambilan keputusan masih menggunkan perasaan. Kepemimpinan seseorang dalam organisasi merupakan faktor yang berperan penting dalam mencapai kinerja yang optimal, karena pemimpin dapat menciptakan kondisi konduksif bagi organisasi, untuk bekerja dengan tenang dan harmonis dalam mencapai kinerja yang optimal. Namun dari hasi wawancara dengan informan dapat disimulkan bahwa kepemimpinan yang ada pada BPD masih belum baik karena Ketua BPD dalam mengambil keputusan tidak terlalu tegas.

Penghargaan

Penghargaan dalam suatu organisasi itu penting karena dengan adanya pemberian penghargaan kepada seseorang akan memberikan motivasi kepada orang untuk bekerja lebih bai. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh informan dapat dipaparkan bahwa dalam organisasi BPD belum pernah mendapatkan pengahargaan yang diberikan Pemerintah Desa atau

Pemerintah Kecamatan, hal inilah yang diduga membuat motivasi BPK kurang bersemangat dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal pembuatan peraturan desa.

Struktur Organisasi

Menurut Hennry Simamora (dalam Mangkunegara,2005:14) dalam faktor organisasi yang mempengaruhi kinerja salah satunta adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah gambaran peran orang-orang yang ada dalam organisasiguna mencapai tujuan, dan sebuah struktur organisasi tentunya ada yang namanya jenjang jabatan yang diduduki seseorang dalam organisasi. Struktur organisasi ini sangat penting dalam mencapai kinerja yang optimal. Karena tanpa adanya struktur organisasi tidak dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang serta fungsi setiap orang dalam sebuah organisasi. Maka dari itu organisasi memerlukan struktur yang baik untuk mencapai tujuan dari orgaisasi tersebut. Struktur organisasi memperlihatkan adanya tanggung jawab seseorang menduduki sebuah jabatan dan membuat proses koordinasi menjadi lebih mudah

Berdasarkan hasil dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasai yang dimiliki BPD sesuai dengan peraturan, dalam struktur organisasi BPD Desa Pisang sudah cukup baik hal ini dilihat dari dimana seseorang yang menduduki jabatan sebagai ketua memiliki tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa diandalkan oleh anggotanya dalam mempertangungjawabkan tugas dan fungsi BPD.

Job Design

bahasa Istilah Indonesia job design dapat diartikan sebagai perancangan kerja. *Job design* (rancangan pekerjaan) adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok orang secara organisasional. Pada dasarnya *job design* ini digunakan dalam manajemen perusahaan yang digunakan untuk merancang bagaimana perusahaan menciptakan kerja yang baik sehingga tercapai kinerja yang optimal. Namun *job design* yang ada pada faktor organisasi juga dapat digunakan dalam organisasi pemerintah khususnya organisasi BPD karena *job design* rancangan pekerjaan dinamis setiap organisasi membutuhkan rancangan pekerjaan untuk menentukan kemana arah organisasi nantinya bekerja, serta apa yang dikerjakan akan lebih terarah dan dapat direncanakan

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan dapat disimpulkan bahwa BPD dalam menjalakan fungsinya sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi

masyarakat dalam bentuk peraturan desa *job design* Badan Permusyawaratan Desa kurang baik. karena anggota BPD tidak memiliki agenda kerja, dan fungsi BPD dipersempit kepala Desa.

E. KESIMPULAN

1. Bahwa Faktor individu secara umum dapat dikatakan kurang baik, terutama yang berkenaan dengan kemampuan, kehalian dan Demografi yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih sangat rendah dan faktor ini di asumsikan yang menyebabkan kinerja BPD dalam penyusunan peraturan Desa kurang optimal.

2. Bahwa Faktor Psikologis dapat diketahui secara umum masih kurang baik dan sangat mempengaruhi kinerja BPD hal ini dilihat dari persepsi dan motivasi anggota BPD terhadap BPD itu sendiri yang masih kurang baik terutama menenai persepsi BPD terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki BPD sangat kurang sekali dan motivasi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kurang, terutama mengenai motivasi BPD untuk masuk kerja yang sangat kurang sekali. Hal inilah yang diasumsikan mengenai kinerja BPD dalam menyusun peraturan desa yang kurang optimal.

3. Bahwa Faktor Organisasi secara umum dapat dikatan belum baik terutama yang berkaitan dengan sumber daya, dan job design yang dimiliki oleh BPD masih rendah karena sumberdaya material yang ada di BPD belum memadai dan keuangan yang dimiliki belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BPD. Dari segi kepemimpinan yang ada pada BPD masih belumbaik karena dalam pengambilan keputusan Ketua BPD belum jelas dan Job desin yang dimiliki BPD belum ada. hal ini yang mengakibatkan kinerja BPD di Desa Pisang dalam menyusun peraturan desa yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga faktor yaitu faktor individu, faktor Psikologis, dan faktor Organisasidapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kinerja BPD dalam menyusun peraturan Desa adalah dari faktor Psikologis dan faktor organisasi dimana aspek yang ada didalamnya masih belum optimal untuk membantu BPD menjalankan tugas dan fungsinya.

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan perhatian pemerintah, untuk meningkatkan kinerja BPD khususnya BPD di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau adapun saran yang dapa tpenulis sampaikan ialah:

1. Secara Individu anggota BPD perlu diadakan bimbingan dan pelatiahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten khususnya tentang mekanisme bagaimana cara menyusun dan merancang peraturan Desa bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Dalam hal Psikologis yang dimiliki oleh BPD, diharapkan anggota BPD dapat memberikan pandangan yang baik terhadap BPD sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang membuat peraturan desa dapat dilakukan secara optimal. BPD harus memiliki sikap yang tegas dalam mengambil keputusan. Ketua BPD harus meningkatkan motivasi dan melihat tingkat absensi anggota BPD.
3. Faktor Organisasi BPD perlu mengajukan pertimbangan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPD kepada pemerintah daerah. perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi juiwa kepemimpinan yang ada pada ketua BPD, terutama dalam membahas, penyusunan dan menetapkan peraturan desa, dan BPD harus membuat agenda kerja.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, peneliti mengalami hambatan-hambatan, sehingga menjadi hambatan tersebut sebagai keterbatasan dalam penelitian yang meliputi:

1. Peneliti susah menemukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena anggota BPD masuk kerja hanya tiga bulan sekali, sehingga peneliti, untuk melakukan penelitian harus pergi kerumah anggota BPD satu persatu.
2. Pemahaman yang kurang dari para anggota BPD mengenai penyusunan peraturan desa, sehingga membuat peneliti sulit untuk member pemahaman mengenai kinerja yang diteliti.

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

3. Keterbatasan waktu peneliti, dalam melakukan pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti. Sehingga peneliti tidak bisa lebih mendalami informasi yang didapat dari informan mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Kurangnya keterampilan penulis dalam merangkai kata-kata dalam membuat kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam bentuk tulisan.

H. REFERENSI

Buku :

Bambang.T.Soemantri,2011,***Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,*** Fokus media, Bandung.

Haw. Widjaja, 2010, ***Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan*** **Utuh,** PT. Grafindo Persada, Jakarta..

Khaerul. Umam. 2009**.** ***Perilaku Oranisasi***. Bandung: Pustaka Setia.

Mengkunegara, A.A Anwar prabu, 2005, ***Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia***. Bandung: Refika. Aditama.

Mashun Mohammad. 2006. ***Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik***. Yogyakarta: BPTE-Yogyakarta.

Moelong Lexy J, 2013. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbin. 2007. ***Teori Administrasi Publik***. Jakarta: Grafindo.

Sudarmanto. 2009. ***Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM***. Yogyakarta: pustaka belajar.

Sembiring Masana. 2012. ***Budaya Kinerja Organisasi***. Bandung: Fokus Media.

Sugiyono, 2007. ***Metode Penelitian Bisnis***. Bandung: Alfabeta.

----------, 2010.***Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D***. Bandung :Alfabeta.

----------, **2011.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R & D***. Bandung :Alfabeta.

Undang- Undang

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang **Desa.**

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang ***BadanPermusyawaratan Desa (BPD)***

Dokumen:

Walburga Ryan Angelo. 2012**.** ***Kinerja Aparat Pemerintah Dalam PelayananPublik di Kantor Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau***: Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Hadiansyah, Nurul. 2013**.** ***Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan***

TelukKeramat Kabupaten Sambas: Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

MARIUS SOPARI, NIM. E43012002
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: MARIUS SOPARI
NIM / Periode lulus	: E43012002 / 2017
Tanggal Lulus	: 07-06-2017
Fakultas/ Jurusan	: FISIPOL / I.A. / Ilmu Pemerintahan
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
E-mail addres/ HP	: mariussoparig32@yahoo.com / 0897861g034

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Rulita yuniarsih, S.IP, M.Si pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
■ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal .....

Rulita Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 19830627 2006 049020

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 24 07-2017

marius Sopari
NIM. E43012002

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)